

Pemberdayaan Potensi Karang Taruna Untuk Tertib Administrasi Desa Sebagai Bentuk Kesuksesan Pelayanan Publik

¹Malabay, ²Ahmad Fuad, ³Sophiyanto Wuryan
¹Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul, Jakarta
²Desain Komunikasi Visual, Universitas Esa Unggul, Jakarta
³Manajemen, Universitas Esa Unggul, Jakarta

E-mail: ¹malabay@esaunggul.ac.id, ²ahmad.fuad@esaunggul.ac.id,
³sophiyanto.wuryan@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan Karang Taruna di desa Kadugeneup untuk meningkatkan kedisiplinan administrasi dan pelayanan publik sebagai wujud mutu layanan kepada warga, dibutuhkan upaya sistematis memberdayakan pemuda lewat Karang Taruna agar berfungsi aktif pengelolaan administrasi desa. Pembekalan berbentuk keahlian dan pengetahuan aplikasi perkantoran dan desain komunikasi visual pembuatan konten pelayan publik. Tujuan dari program pengabdian kepada masyarakat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anggota Karang Taruna tentang makna administrasi yang tertib, meningkatkan keahlian manajerial dan organisasi digolongan pemuda, meningkatkan partisipasi pemuda. Tata cara penerapan terdiri dari sosialisasi yaitu dengan meningkatkan pemahaman anggota Karang Taruna tentang berartinya administrasi, pelatihan dengan membagikan pelatihan terpaut manajemen dan administrasi, pelaksanaan teknologi dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan administrasi, pendampingan serta penilaian dengan melaksanakan pendampingan sepanjang penerapan dan penilaian hasil, keberlanjutan program dengan menyusun rencana untuk keberlanjutan program. Hasil yang diperoleh menampilkan kenaikan partisipasi pemuda dalam pemerintahan desa, meningkatnya koordinasi antara Karang Taruna dengan pemerintah desa serta warga, kenaikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, terbangunnya rasa kepemilikan serta tanggung jawab digolongan generasi muda terhadap pembangunan desa.

Kata kunci : Pemberdayaan Potensi; Karang Taruna; Tertib Administrasi Desa; Pelayanan Publik

ABSTRACT

Empowerment of Karang Taruna in Kadugeneup village to improve administrative discipline and public services as a form of service quality to residents, systematic efforts are needed to empower youth through Karang Taruna so that they actively function in managing village administration. Provision in the form of expertise and knowledge of office applications and visual communication design for creating public service content. The purpose of the community service program is to increase the understanding and knowledge of Karang Taruna members about the meaning of orderly administration, improve managerial and organizational skills among youth groups, and increase youth participation. The implementation procedure consists of socialization, namely by increasing the understanding of Karang Taruna members about the meaning of administration, training by distributing training related to management and administration, implementing technology by integrating technology in administrative management, mentoring and assessment by implementing mentoring throughout the implementation and assessment of results, program sustainability by preparing plans for program sustainability. The results obtained show an increase in youth participation in village government, increased coordination between Karang Taruna and the village government and residents, increased transparency and accountability in public services, and the development of a sense of ownership and responsibility among the younger generation towards village development.

Keywords: Potential Empowerment; Karang Taruna; Orderly Village Administration; Public Services

1. PENDAHULUAN

Berdirinya Karang Taruna disebut Desa dapat dijelaskan sebagai Kebutuhan Lokal berarti respons terhadap kebutuhan masyarakat adanya wadah atau organisasi yang mampu menggerakkan pemuda dan pemudi di Desa untuk berpartisipasi aktif berbagai kegiatan positif, termasuk bidang sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Inisiatif Pemuda untuk membentuk Karang Taruna datang dari kalangan pemuda dan pemudi yang merasa memiliki sebuah organisasi yang mampu mewadahi potensi. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bangsa, dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan (Sari, 2016). Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial masyarakat berbasis kepemudaan didirikan atas kepedulian kaum muda terhadap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna (Ahmad Syafii Maarif, Abdul Gafur Da, Sri Jutmini, Dasim Budiansyah, Warsono, 1829). Pemberdayaan membantu membangun kemitraan yang kuat antara pemuda dan otoritas pemerintah daerah, akhirnya mengarah pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan terencana dan berkelanjutan mencapai masyarakat Desa yang dicita-citakan mencapai masyarakat sejahtera (Kabupaten et al., 2019). Partisipasi Karang Taruna merupakan partisipasi dari sejumlah individu yang berada dalam kelompok yang terorganisasikan (Rukanda & Nurhayati, 2020).

Pola Pembentukan yang melibatkan berbagai tahapan seperti musyawarah pemuda, penentuan struktur organisasi, pemilihan pengurus dan penetapan program kerja. Legalitas yaitu pengakuan dan dukungan resmi dari pemerintah seperti di tingkat kecamatan atau kabupaten untuk mendukung berbagai kegiatan.

Di Desa Kadugenep Karang Taruna dibentuk kepemimpinan Kepala Desa Bapak Padri tahun 1998, saat itu Desa Kadugenep belum pemekaran dan pada tahun 2012 terjadi pemekaran Desa Kadugenep dan Desa Kubang Jaya, saat itu kepala Desa dijabat oleh Bapak H. Rohman dan Ketua Karang Taruna saat itu Bpk Aan dan mulai berkembang pada masanya, banyak kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna seperti kegiatan Perlombaan 17 Agustusan. Namun seiring berjalannya waktu, Karang Taruna pun mulai kehilangan jati dirinya.

Di Tahun 2020, di kepemimpinan kepala Desa H. Muhamad Aopidi, Organisasi Karang Taruna mulai dibangun kembali, mulai dari pembentukan pengurus yang diketuai oleh Idrus pada program pengadaan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa serta pembuatan dan pemberdayaan Sekretariat Bersama Karang Taruna dan Gotong Royong Pembuatan Gapura Desa. Pemberdayaan Potensi Karang Taruna menjamin Ketertiban Administrasi di Desa sebagai salah satu bentuk keberhasilan penyelenggaraan Pelayanan Publik. Permasalahan lainnya adalah perlunya kejelasan peran dan tanggung jawab di Karang Taruna. Tanpa tugas dan mekanisme Akuntabilitas yang jelas, memungkinkan terjadi kebingungan dan inefisiensi organisasi beroperasi, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan pemberian layanan dan pengawasan Administratif. Dari segi Geografis, potensi wilayah Desa mencakup sumber daya alam, infrastruktur dan letak geografis. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pembangunan dan keberlanjutan Desa serta efektivitas pemberian Layanan Publik. Mengidentifikasi potensi isu-isu prioritas pada pemberdayaan Karang Taruna untuk menjamin ketertiban Administrasi di Desa sebagai bentuk keberhasilan penyampaian Layanan Publik, dengan fokus pada aspek

kegiatannya adalah perlunya program peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi anggota Karang Taruna untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pada tugas-tugas Administratif. Hal ini dapat mencakup pelatihan mengenai pencatatan, komunikasi, pengambilan keputusan dan resolusi konflik agar dapat secara efektif melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban Administratif. Isu prioritas lainnya adalah penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Karang Taruna pada struktur Administrasi Desa.

Mendefinisikan tugas dan fungsi khusus anggota Karang Taruna dapat membantu menyederhanakan upaya lembaga Karang Taruna dan memastikan bahwa Karang Taruna berkontribusi secara efektif terhadap tujuan keseluruhan peningkatan Pelayanan Publik. Selain itu, mengatasi segala tantangan atau hambatan yang mungkin menghambat partisipasi aktif Karang Taruna pada kegiatan Administratif dapat menjadi isu prioritas lainnya. Beberapa permasalahan utama yang mungkin muncul yaitu kurangnya sumber daya dan dukungan yang diberikan kepada Karang Taruna oleh pemerintah setempat atau pendidikan karakter pada dasarnya dapat diimplementasikan di berbagai tempat khususnya pendidikan nonformal atau Karang Taruna, terutama dalam membangun karakter social (Widiatmaka et al., 2023).

Dengan memprioritaskan isu-isu utama ini dan fokus pada peningkatan kapasitas, peran dan partisipasi Karang Taruna pada kegiatan Administratif, Desa dapat memanfaatkan potensi Karang Taruna dengan lebih baik untuk meningkatkan ketertiban Administrasi dan pada akhirnya meningkatkan Pelayanan Publik yang bermanfaat bagi masyarakat Desa. Solusi potensial untuk mengatasi tantangan terkait pemberdayaan Karang Taruna untuk menjamin ketertiban Administrasi di Desa

sebagai bentuk keberhasilan penyampaian Layanan Publik dengan peningkatan kapasitas yaitu memberikan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota Karang Taruna untuk meningkatkan keterampilan pada tugas Administratif, kepemimpinan dan keterlibatan masyarakat. Disisi lainnya gambaran tentang peran budaya digital untuk memberdayakan potensi Karang Taruna untuk menjamin ketertiban administrasi di desa sebagai wujud keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sangat penting, digital culture atau budaya digital menjadi pandangan yang bersumber dari penggunaan teknologi dan internet, melatih cara berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi sebagai individu pada lingkup masyarakat (Mahaputra & Yamin, 2023).

2. LANDASAN TEORI

Salah satu teori yang dapat diterapkan untuk konteks ini adalah teori pemerintahan partisipatif. Teori tata kelola partisipatif menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat seperti Karang Taruna, untuk proses pengambilan keputusan dan pemberian layanan publik. Dengan memberdayakan Karang Taruna dan melibatkan pada penyelenggaraan urusan desa, maka akan menumbuhkan rasa kepemilikan, tanggung jawab dan akuntabilitas di kalangan generasi muda terhadap pelayanan publik. Melalui tata kelola partisipatif, Karang Taruna dapat berkontribusi aktif menjaga ketertiban administrasi di desa dengan berkolaborasi dengan otoritas setempat, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menerapkan solusi yang responsif terhadap tuntutan penduduk setempat. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan publik tetapi juga menumbuhkan rasa pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan pada proses

pemerintahan daerah. Ringkasnya, penerapan teori pemerintahan partisipatif dapat berperan penting memberdayakan Karang Taruna untuk menjamin ketertiban administratif di desa dan mencapai keberhasilan penyampaian layanan publik.

Penerapan budaya digital memberdayakan anggota Karang Taruna mengakses informasi, sumber daya dan kesempatan pelatihan dengan lebih mudah, hal ini meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan mengelola tugas administratif secara efektif dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Adopsi budaya digital di Karang Taruna dapat berperan memperkuat perannya menjamin ketertiban administrasi di desa dan mencapai keberhasilan penyampaian layanan publik. Dengan memanfaatkan alat dan praktik digital, Karang Taruna dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan dampaknya berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Budaya lainnya berupa gambaran tentang peran keterampilan budaya (*Skill Culture*) pada memberdayakan potensi Karang Taruna untuk menjamin ketertiban administrasi di desa sebagai wujud keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Keterampilan budaya memainkan peran penting memberdayakan Karang Taruna untuk menjaga ketertiban administrasi di desa secara efektif. Sisi lain transformasi digital dapat mengarah pada peningkatan transparansi, akuntabilitas dan daya tanggap penyelenggaraan pelayanan publik atau dunia digital menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik (Ayu et al., 2022). Bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan sebuah proses pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mencapai good governance (Auliyaa et al., 2021).

Selain itu, keterampilan budaya memungkinkan Karang Taruna untuk memasukkan kearifan dan praktik lokal, menjadikannya lebih relevan dan diterima oleh masyarakat, menghormati dan menghargai keberagaman budaya, Karang Taruna dapat menumbuhkan inklusivitas dan kohesi sosial, yang merupakan hal penting keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Intinya, integrasi keterampilan budaya pada pemberdayaan Karang Taruna meningkatkan kemampuan untuk terlibat dengan masyarakat, mendorong partisipasi local dan memastikan pelaksanaan proses administrasi yang efektif, berkontribusi terhadap keberhasilan penyampaian layanan publik di pedesaan secara keseluruhan dan pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan. Beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemberdayaan Karang Taruna untuk menjamin ketertiban administrasi di desa sebagai bentuk keberhasilan penyampaian layanan publik adalah adanya peningkatan kapasitas dengan memberikan pelatihan dan program peningkatan kapasitas untuk Karang Anggota Taruna untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di berbagai bidang seperti kepemimpinan, keterlibatan masyarakat dan prosedur administrasi. Hal ini akan memungkinkan untuk berkontribusi secara efektif dalam menjaga ketertiban administrasi di desa. Kolaborasi dan kemitraan dengan menumbuhkan kolaborasi dan kemitraan antara Karang Taruna, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain yang terlibat pada penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan bekerja sama, tentunya dapat memanfaatkan kekuatan dan sumber daya satu sama lain untuk mengatasi tantangan administratif dan meningkatkan pemberian layanan. Pemberdayaan dan partisipasi dengan memberdayakan anggota Karang Taruna dengan melibatkan pada proses

pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan dan implementasi inisiatif terkait pemberian layanan publik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab namun juga memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan yang patut diperhitungkan. Monitoring dan evaluasi dengan menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi dampak keterlibatan Karang Taruna untuk menjaga ketertiban administrasi dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Hal ini akan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengukur kemajuan dan memastikan akuntabilitas pada implementasi inisiatif. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, pemberdayaan Karang Taruna menjamin ketertiban administrasi di desa dapat lebih efektif untuk mencapai keberhasilan penyampaian layanan publik dan mendorong pembangunan masyarakat. Luaran atau outcome yang diharapkan dari penanganan permasalahan terkait pemberdayaan potensi Karang Taruna dalam menjamin ketertiban administrasi di desa sebagai wujud keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berupa: Peningkatan efisiensi administrasi dengan memberdayakan Karang Taruna untuk membantu menjaga ketertiban administrasi, desa dapat merasakan proses administrasi yang lebih lancar dan efisien, sehingga pengambilan keputusan dan penyampaian layanan menjadi lebih cepat. Peningkatan keterlibatan masyarakat dengan melibatkan Karang Taruna dalam pemerintahan desa dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan generasi muda terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Penguatan kepemimpinan pemuda dengan Pemberdayaan Karang Taruna dapat membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan di

kalangan pemuda, memungkinkan untuk mengambil peran yang lebih aktif pada pemerintahan daerah dan proses pengambilan keputusan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan Karang Taruna pada tugas-tugas administratif, transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa akan lebih baik. Secara keseluruhan, upaya memberdayakan Karang Taruna untuk menjamin ketertiban administratif di desa-desa dapat memberikan berbagai hasil positif yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyampaian layanan publik dan tata kelola di tingkat daerah. Solusi sistematis dan menguraikan target, hasil dan indikator spesifik untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan Karang Taruna untuk menjamin ketertiban administrasi di desa sebagai bentuk keberhasilan penyampaian layanan publik.



Gambar 1. Pelaksanaan Abdimas

3. METODOLOGI

Gambaran tahapan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Pemberdayaan Potensi Karang Taruna guna menjamin ketertiban Administrasi di Desa-desa sebagai wujud keberhasilan

penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk adalah :

1. **Sosialisasi** dengan melakukan tahapan pertama berupa meningkatkan kesadaran dan mendidik anggota Karang Taruna tentang pentingnya menjaga ketertiban Administrasi di desa dan peran untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan ini bertujuan untuk menggalang dukungan dan komitmen organisasi pemuda terhadap inisiatif tersebut.

2. **Pelatihan** dengan memberikan sesi pelatihan Aplikasi Perkantoran atau *Microsoft Office* untuk membekali anggota Karang Taruna yaitu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dan efisien untuk menjaga ketertiban Administrasi. Ini mungkin termasuk pelatihan tentang Prosedur Administrasi, Keterampilan Komunikasi, Kepemimpinan dan Pemecahan Masalah.

3. **Penerapan Teknologi** dengan memperkenalkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi yang tepatguna untuk memperlancar proses Administrasi dan meningkatkan efisiensi Tata Kelola Desa. Teknologi dapat membantu Pengelolaan Data, Komunikasi dan Pengambilan Keputusan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penyampaian Layanan Publik.

4. **Pendampingan dan Evaluasi** dengan memberikan bimbingan dan dukungan berkelanjutan kepada semua anggota Karang Taruna dengan melaksanakan inisiatif untuk menjamin ketertiban Administrasi di Desa. Pendampingan dan Evaluasi tentunya dapat membantu mengatasi tantangan, memberikan umpan balik dan memfasilitasi penguatan pembelajaran dan pertumbuhan pada organisasi pemuda. Evaluasi, Secara berkala menilai kemajuan dan dampak inisiatif pemberdayaan terhadap keterlibatan Karang Taruna menjaga ketertiban Administrasi. Evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, area yang perlu ditingkatkan

dan efektivitas program secara keseluruhan.

5. **Keberlanjutan Program** dengan mengembangkan strategi untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan dan kesinambungan keterlibatan Karang Taruna mendorong ketertiban Administrasi di Desa. Hal ini dapat melibatkan pembentukan kemitraan, mengamankan sumber daya dan menumbuhkan budaya Akuntabilitas dan kepemilikan pada organisasi pemuda. Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Masyarakat non-produktif berfungsi untuk mengatasi masalah *dalam bidang produksi* yaitu produksi berkas dan masalah *dalam bidang manajemen* yaitu mengelola penertiban pemberkasan dengan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat melalui cara seperti **sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, evaluasi dan keberlanjutan program** dapat berkontribusi signifikan untuk Pemberdayaan Karang Taruna dan terjaminnya Ketertiban Administrasi di Desa.

Kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi Masyarakat untuk menjaga ketertiban Administrasi. Program pelatihan dapat membekali anggota Karang Taruna dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan peran pada pemerintahan desa secara efektif atau penerapan teknologi dapat menyederhanakan proses Administrasi dan meningkatkan efisiensi pemberian layanan. Pendampingan dan bimbingan dari individu yang berpengalaman dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada anggota Karang Taruna pada tugas administratifnya. Evaluasi berkala terhadap dampak dan efektivitas program sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan keberhasilan program. Mempertahankan aktivitas dan inisiatif program sangat penting untuk mencapai

dampak jangka panjang dan pengembangan Masyarakat.

Dengan memberdayakan Karang Taruna untuk menjamin ketertiban Administrasi dan memfasilitasi penerbitan izin dan tempat latihan Administrasi di Desa, program ini dapat meningkatkan Pelayanan Publik bagi Masyarakat non-produktif, yang pada akhirnya akan mengarah pada keberhasilan pelaksanaan Pelayanan Publik dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang berkelanjutan.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program berupa kesediaan tempat pelatihan dan sarana pendukung pelatihan seperti *in-focus* dan layar untuk proses pelatihan, kewajiban hadir dari jajaran Struktur Pejabat Desa sebagai bentuk dukungan untuk kebersamaan pembekalan materi sebagai penguatan keterampilan agar dapat bersinergis.

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program Pemberdayaan Potensi Karang Taruna untuk Tertib Administrasi Desa sebagai bentuk kesuksesan Pelayanan Publik dapat dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Karang Taruna untuk meningkatkan tertib administrasi desa:

1. Pelatihan Aplikasi Perkantoran

Sesi Pelatihan Rutin: Adakan sesi pelatihan rutin untuk anggota Karang Taruna mengenai penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Pelatihan ini dapat mencakup pembuatan dokumen administrasi, pengolahan data, dan presentasi informasi.

Modul Pembelajaran: Kembangkan modul pembelajaran yang mudah dipahami dan dapat diakses secara online. Ini akan membantu anggota yang memiliki keterbatasan waktu untuk belajar secara mandiri.

2. Penggunaan Aplikasi untuk Administrasi

Pembuatan Dokumen: Aplikasi perkantoran dapat digunakan untuk membuat dokumen administrasi desa, seperti laporan kegiatan, notulen rapat, dan surat-menyurat. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan administrasi.

Pengolahan Data: Gunakan aplikasi spreadsheet (seperti Excel) untuk mengelola dan menganalisis data terkait kegiatan Karang Taruna, seperti jumlah peserta, anggaran, dan hasil evaluasi kegiatan. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

3. Kolaborasi dan Komunikasi

Platform Kolaborasi: Manfaatkan aplikasi perkantoran yang mendukung kolaborasi, seperti Google Workspace atau Microsoft 365, untuk memfasilitasi kerja sama antar anggota Karang Taruna. Dengan fitur berbagi dokumen dan kolaborasi real-time, anggota dapat bekerja sama lebih efektif.

Komunikasi Efektif: Gunakan aplikasi komunikasi seperti Microsoft Teams atau Slack untuk memudahkan komunikasi antar anggota. Ini akan membantu dalam koordinasi kegiatan dan penyampaian informasi secara cepat.

4. Integrasi dengan Teknologi Lain

Sistem Informasi Administrasi: Integrasikan aplikasi perkantoran dengan sistem informasi administrasi desa yang lebih besar. Hal ini akan memudahkan pengumpulan data dan pelaporan yang lebih terstruktur.

Penggunaan Aplikasi Mobile: Kembangkan aplikasi mobile yang dapat diakses oleh anggota Karang Taruna untuk memudahkan mengelola tugas administrasi di mana saja dan kapan saja.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

Mekanisme Umpan Balik: Setelah pelatihan dan implementasi, buat mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari anggota mengenai penggunaan aplikasi perkantoran. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu

ditingkatkan dan menyesuaikan pelatihan di masa mendatang.

Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan aplikasi perkantoran dalam mendukung administrasi desa. Ini akan membantu dalam memastikan bahwa aplikasi tersebut benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan.



Gambar 2. Gambaran IPTEKS

Gambaran IPTEKS yang akan diimplementasikan diawali dengan tahapan pemberian materi atau pembekalan yang dimaknai konteks *Input* pada Pemberdayaan Potensi Karang Taruna Untuk Tertib Administrasi dengan Materi Aplikasi Komputer. Setelah kegiatan pembekalan selesai maka dilakukan kegiatan pelatihan yang dimaknai konteks *Proses* yaitu Pemberdayaan Potensi Karang Taruna Untuk Tertib Administrasi dengan Pelatihan Aplikasi Komputer, adapun aplikasi komputer berupa *Microsoft Office* yang terdiri atas *Microsoft Word*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Powerpoint*, Aplikasi Pendukung lainnya dan *Internet*.

Untuk memperkuat pelatihan diiringi studi kasus sebagai penerepan Metode Akhir untuk Menyimpulkan Deskripsi dan Simpulan dari Materi Aplikasi Komputer. Akhir dari kegiatan pelatihan adalah dimaknai konteks *Output* yaitu Menghasilkan pengetahuan dan keterampilan Aplikasi Komputer sebagai wujud : Pemberdayaan Potensi Karang

Taruna. Guna memperkuat Hasil dilakukan sebuah proses Evaluation berupa latihan-latihan sebagai penguatan materi.

Implementasi IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) terkait Pemberdayaan Potensi Karang Taruna untuk Tertib Administrasi Desa sebagai bentuk kesuksesan Pelayanan Publik dapat dirinci meliputi berbagai pendekatan dan aplikasi teknologi serta pengetahuan yang relevan. Berikut adalah beberapa gambaran IPTEKS yang dapat diimplementasikan dalam Pengabdian kepada Masyarakat yaitu:

1. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Desa, dapat diterapkan pengembangan sistem informasi yang mendukung Administrasi Desa. Ini termasuk pengembangan aplikasi atau platform digital yang memudahkan pencatatan data, monitoring kegiatan dan pelaporan Administrasi Desa oleh Karang Taruna. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan Administrasi Desa.
2. Pelatihan dan Edukasi Berbasis Teknologi dapat digunakan mengembangkan konten edukasi berbasis teknologi, pembuatan modul pelatihan online atau aplikasi *mobile* untuk memperkenalkan konsep-konsep Administrasi Desa kepada anggota Karang Taruna. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengelola Administrasi Desa secara efektif.
3. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi bisa juga berfokus pada peningkatan partisipasi Masyarakat Administrasi Desa. Contohnya adalah penggunaan platform Media Sosial atau aplikasi pesan instan untuk menginformasikan kegiatan Administrasi Desa, menggalang partisipasi Kegiatan Publik atau memfasilitasi diskusi dan konsultasi antara Karang Taruna dan warga Desa.
4. Analisis Data untuk Pengambilan Keputusan dapat digunakan pada analisis data untuk mendukung pengambilan

keputusan terkait kebijakan Administrasi Desa. Pengumpulan dan analisis data tentang partisipasi masyarakat, efektivitas kebijakan atau kebutuhan Administrasi Desa dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Karang Taruna dan Pemerintah Desa guna meningkatkan Pelayanan Publik.

5. Pengembangan Model Pelaporan dan Evaluasi dapat digunakan untuk mengembangkan model pelaporan dan evaluasi yang lebih efisien dan terukur. Ini termasuk pengembangan formulir elektronik untuk pelaporan kegiatan, penggunaan sistem monitoring progres secara real-time atau penggunaan teknik evaluasi kinerja untuk menilai dampak dari kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna terhadap Administrasi Desa.

Melalui implementasi IPTEKS yang tepat sasaran pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Pemberdayaan Potensi Karang Taruna untuk Tertib Administrasi Desa, dapat tercipta inovasi dan perbaikan yang signifikan pada pelayanan publik di tingkat Desa. Kajian proyek pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan Karang Taruna untuk meningkatkan ketertiban administrasi di desa diharapkan menunjukkan hasil yang positif, sesuai panduan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) menerapkan paradig kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan (Penelitian et al., 2024). Pemberdayaan Karang Taruna untuk menjamin ketertiban administrasi di desa-desa telah menyoroti pentingnya keterlibatan pemuda pada pemerintahan daerah dan dampak positifnya terhadap pemberian layanan publik dan pengembangan masyarakat, hal ini tentunya diharapkan dapat bersinergis dengan seluruh program Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan dalam mengatasi Tema Sentral yang menjadi unggulan Universitas Esa Unggul, yaitu

pada implementasi *Sustainability Development Goals* (SDGs) (Universitas Esa Unggul, 2022).

5. KESIMPULAN

Pemberdayaan Karang Taruna di desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan penyelenggaraan layanan publik. Melalui kolaborasi antara Karang Taruna, pemerintah desa dan penyedia layanan publik, inisiatif ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi desa. Penggunaan teknologi informasi dan aplikasi komputer juga menjadi kunci dalam menganalisis dan mengoptimalkan pemberdayaan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan melibatkan pemuda dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan dapat tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembangunan desa.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada **Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang telah memberi pendanaan pengabdian Masyarakat dan **LPPM Universitas Esa Unggul** yang mendukung kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat** ini sehingga pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syafii Maarif, Abdul Gafur Da, Sri Jutmini, Dasim Budiansyah, Warsono, A. A. (1829). *Jurnal Civics Salam Media Kajian Kewarganegaraan*. 15(2), 95–102. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://staffnew.uny.ac.id/upload/131655980/lainlain/Jurnal Civics Vol 5, No.2, Desember 20081.pdf

- Auliyaa, P., Hidayat, R., & Nababan, R. (2021). *Implementation of e-government-based public services through ogan lopian*. 18(4), 502–512.
- Ayu, I. W., Zulkarnaen, Z., & Fitriyanto, S. (2022). Budaya Digital Dalam Transformasi Digital Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i1.922>
- Kabupaten, J., Barat, H., Lumintang, J., & Kawung, E. J. R. (2019). *HOLISTIK*, Vol. 12 No. 2/ April – Juni 2019. 12(2), 1–20.
- Mahaputra, U., & Yamin, M. (2023). *PROSIDING*. 6681(6), 668–674.
- Penelitian, P., Pengabdian, D. A. N., Masyarakat, K., Pendidikan, K., & Teknologi, D. A. N. (2024). *Drtpm* 2024.
- Rukanda, N., & Nurhayati, S. (2020). *Jurnal Comm-Edu*. 5492, 144–155.
- Sari, D. D. (2016). Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda. *Jurnal Pendidikan*, 01, 58–64.
- Universitas Esa Unggul. (2022). *RENCANA INDUK PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS E S A U N G G U L 2022-2026*. LPPM Universitas Esa Unggul.
- Widiatmaka, P., Mujahidah, N., Rahmap, R., & Arifudin, A. (2023). Pendidikan karakter melalui karang taruna untuk membangun karakter sosial pada generasi digital native. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1), 32–41. <https://doi.org/10.21831/jpka.v14i1.57036>

